

**ANALISIS KINERJA REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH (APBD) PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT**

Muhammad Syukri

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Saepul Pahmi

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Suandi

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Korespondensi penulis: m.syukri@45mataram.ac.id

Abstract

This study aims to determine the financial performance of the West Lombok Regency Government by using financial ratio analysis to the West Lombok Regency regional income and expenditure budget for the 2018 - 2020 fiscal year. The type of research used is a quantitative method. The data processed is a summary of the 2018-2020 regional revenue and expenditure budgets obtained from the Regional Financial and Asset Management Agency. Based on the calculation results, it can be concluded that the financial performance of West Lombok Regency is quite effective and very efficient. Thus, government management must be able to increase and maximize PAD for the following years.

Keywords: Financial Performance, Ratio, Effective, efficient.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dengan menggunakan analisis rasio keuangan terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Lombok Barat tahun anggaran 2018 - 2020. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Data yang diolah adalah ringkasan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2018-2020 yang didapatkan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Berdasarkan hasil perhitungan, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan Kabupaten Lombok Barat tergolong cukup efektif dan sangat efisien. Dengan demikian, manajemen pemerintahan harus mampu meningkatkan dan memaksimalkan PAD untuk tahun-tahun berikutnya.

Kata kunci : Kinerja Keuangan, Rasio, Efektif, efisien.

PENDAHULUAN

Received Desember 23, 2020; Revised Januari 2, 2021; Januari 22, 2021

* Muhammad Syukri, m.syukri@45mataram.ac.id

Pemerintah daerah merupakan lembaga yang memiliki tugas untuk mengatur roda pemerintahan di daerah, pembangunan daerah, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat luas. Anggaran merupakan salah satu bagian yang utama dalam menjalankan sebuah roda pemerintahan. Terjadinya gejolak tidak kepuasan atau tidak adanya transparansi anggaran dan kepercayaan masyarakat sangat bergantung pada kondisi anggaran yang transparan, kejelasan, kewajaran maupun realisasi dari sebuah anggaran dalam program kerja instansi pemerintahan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010, laporan keuangan berperan untuk memberikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan transaksi selama satu periode pelaporan. Salah satu teknik yang paling banyak digunakan untuk menganalisis laporan keuangan adalah analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan terhadap APBD dilakukan dengan cara menghitung kinerja keuangan daerah. Analisis rasio keuangan APBD diharapkan dapat menjadi suatu alat ukur untuk menilai kinerja keuangan Pemerintah Daerah sebagai pengambil andil terbanyak dalam upaya perkembangan suatu daerah.

Agar pembahasan lebih terfokus, maka dilakukan pembatasan masalah pada bagaimana kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Lombok Barat berdasarkan hasil dari perhitungan rasio pertumbuhan pendapatan dan belanja daerah, rasio ketergantungan keuangan, rasio kemandirian keuangan, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi keuangan, rasio derajat desentralisasi, dan rasio keserasian belanja. Sehubungan dengan permasalahan yang diajukan maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Lombok Barat dari hasil perhitungan rasio pertumbuhan, rasio ketergantungan keuangan, rasio kemandirian keuangan, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi keuangan, rasio derajat desentralisasi, dan rasio efisiensi belanja selama tahun anggaran 2018-2020. Manfaat penelitian ini adalah secara akademik sebagai syarat beban kerja Dosen dan secara teoritis untuk memperdalam dan menerapkan teori-teori mengenai keuangan daerah dan APBD.

LANDASAN TEORI

Pengertian Kinerja

Menurut Muhibtari (2014), kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Kinerja keuangan daerah

adalah tingkat capaian dari suatu hasil kerja pada bidang keuangan daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan tujuan untuk mengetahui keuangan suatu daerah dalam mengelola keuangannya.

Pengertian Laporan Keuangan

Menurut Kasmir (2015), laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Sedangkan menurut Mahmudi (2016), laporan keuangan adalah informasi yang disajikan untuk membantu *stakeholder* dalam membuat keputusan sosial, politik, dan ekonomi sehingga keputusan yang diambil bisa lebih berkualitas.

Pengertian Realisasi Anggaran

Menurut Assidiqi (2014), realisasi anggaran merupakan proses pelaksanaan segala sesuatu yang telah direncanakan dan dianggarkan oleh organisasi publik. Sedangkan menurut Magfira (2019), realisasi adalah proses yang harus diwujudkan untuk menjadi kenyataan dan pelaksanaan yang nyata agar realisasi dapat sesuai dengan harapan diinginkan.

Pengertian Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Menurut Suprpto (2016), laporan realisasi anggaran adalah laporan yang berisi tentang informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan dari suatu entitas yang dibandingkan dengan anggaran ketiga pos tersebut. Laporan realisasi anggaran yang selanjutnya disebut dengan LRA merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola, serta menggambarkan perbandingan antara anggaran realisasinya dalam suatu periode pelaporan yang terdiri atas pendapatan dan belanja.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif, yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan, menjelaskan, atau meringkas berbagai situasi, fenomena, atau berbagai variabel

penelitian menurut kejadian sebagaimana adanya yang dapat dipotret, diwawancara, diobservasi, serta yang dapat diungkapkan melalui bahan-bahan dokumenter (Bungin, 2015).

Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Lombok Barat yang berlokasi di Jl. Soekarno-Hatta, Giri Menang-Gerung.

Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Lombok Barat tahun anggaran 2018-2020. Data tersebut merupakan dokumentasi yang diperoleh melalui website Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat yaitu bpkad.lombokbaratkab.go.id dan ppid.lombokbaratkab.go.id.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2018-2020

Analisis kinerja keuangan pendapatan daerah Kabupaten Lombok Barat secara umum menunjukkan bahwa kinerja keuangan pendapatan daerah dikatakan baik, tetapi masih kurang dalam penyelenggaraan desentralisasi dan terdapat ketergantungan pada pemerintah pusat, serta dalam hal pemungutan pajak daerah belum efisien.

a. Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah

Kinerja keuangan pendapatan daerah dilihat dari analisis pertumbuhan daerah Kabupaten Lombok Barat tahun anggaran 2018-2020 dapat dikatakan mengalami pertumbuhan. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata pertumbuhan yang positif yaitu 12,56%. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu 16,72%, sedangkan pertumbuhan terendah (tidak mengalami pertumbuhan) terjadi pada tahun 2020 yaitu 1,38%.

b. Analisis Rasio Keuangan Pendapatan Daerah

1. Rasio ketergantungan keuangan daerah

Berdasarkan perhitungan rasio ketergantungan keuangan daerah dapat dikatakan bahwa tingkat ketergantungan keuangan Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2018-2020 dalam kategori sangat tinggi yang ditunjukkan dengan rata-rata rasio ketergantungan keuangan daerah sebesar 84,50%. Hasil ini menunjukkan bahwa masih terdapat ketergantungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat terhadap Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi.

2. Rasio kemandirian keuangan

Berdasarkan perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah dapat dikatakan bahwa tingkat kemandirian keuangan Kabupaten Lombok Barat tahun anggaran 2018-2020 dalam kategori instruktif yang ditunjukkan dengan rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah sebesar 16,41%. Hasil menunjukkan bahwa masih terdapat peran atau campur tangan pemerintah pusat yang lebih dominan dalam urusan otonomi daerah Kabupaten Lombok Barat.

3. Rasio efektivitas pendapatan asli daerah

Berdasarkan perhitungan rasio efektivitas pendapatan asli daerah dapat dikatakan bahwa tingkat efektivitas keuangan Kabupaten Lombok Barat tahun anggaran 2018-2020 dalam kategori cukup efektif yang ditunjukkan dengan rata-rata rasio efektivitas sebesar 92,23%.

4. Rasio efisiensi keuangan

Berdasarkan perhitungan rasio efisiensi keuangan dapat dikatakan bahwa tingkat efisiensi keuangan Kabupaten Lombok Barat tahun anggaran 2018-2020 dalam kategori efisien yang ditunjukkan dengan rata-rata rasio efisiensi sebesar 12,28%.

5. Rasio derajat desentralisasi

Derajat desentralisasi Kabupaten Lombok Barat tahun anggaran 2018-2020 tergolong rendah yang ditunjukkan dengan rata-rata derajat desentralisasi sebesar 13,48%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah tidak mampu menyelenggarakan desentralisasi.

Analisis Kinerja Keuangan Belanja Daerah

1. Analisis Pertumbuhan Belanja Daerah

Analisis pertumbuhan belanja daerah berguna untuk mengetahui pertumbuhan belanja dari tahun ke tahun. Kinerja keuangan belanja daerah dilihat dari analisis pertumbuhan belanja daerah Kabupaten Lombok Barat tahun anggaran 2018-2020 mengalami pertumbuhan positif. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 12,59%.

2. Analisis Rasio Keceragaman Belanja

Analisis rasio keceragaman belanja bermanfaat untuk mengetahui keseimbangan antar belanja. Tahun 2018-2020 sebagian besar dana yang dimiliki pemerintah masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja operasi sehingga rasio belanja modal terhadap total belanja masih relatif kecil yaitu 19,58% dibandingkan dengan rasio belanja operasi terhadap total belanja sebesar 80,35%.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan masalah dan hasil analisis data yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat jika dilihat dari rasio pertumbuhan pendapatan sudah baik dan memiliki pertumbuhan positif setiap tahunnya dengan nilai rata-rata 12,56%.
2. Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat jika dilihat dari rasio ketergantungan keuangan daerah termasuk sangat tinggi dengan rata-rata 84,50%. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat ketergantungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat terhadap Pemerintah Pusat atau Provinsi.
3. Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat jika dilihat dari rasio kemandirian keuangan tergolong instruktif dengan rata-rata 16,41%. Hal ini menunjukkan bahwa peran atau campur tangan pemerintah pusat dalam urusan otonomi daerah lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah.
4. Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat jika dilihat dari rasio efektivitas PAD termasuk cukup efektif dengan nilai rata-rata sebesar 92,23%.
5. Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat jika dilihat dari rasio efisiensi keuangan tergolong efisien dengan nilai rata-rata sebesar 12,28%.

6. Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat jika dilihat dari rasio derajat desentralisasi tergolong rendah dengan nilai rata-rata sebesar 13,48%.
7. Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat jika dilihat dari rasio pertumbuhan belanja sudah baik dan memiliki pertumbuhan positif setiap tahunnya dengan nilai rata-rata 12,59%.
8. Hasil perhitungan rasio keserasian menunjukkan bahwa sebagian besar dana yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Lombok Barat masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja operasi, sehingga rasio belanja modal masih relatif kecil.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- [2] Muhibtari, Astriana Nabila, Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2008-2012 (Skripsi) , Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2014.
- [3] Kasmir, Analisis Laporan Keuangan, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- [4] Mahmudi, Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Yogyakarta, 2016.
- [5] Assidiqi, Bahrin, Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klaten Tahun 2008-2012 (Skripsi), Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2014.
- [6] Magfira, Diah Zulfiana, Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Ditinjau Dari Rasio Keuangan (Studi Kasus pada Pemerintah Provinsi NTB Tahun 2010-2017) (Skripsi), STIE 45 Mataram, Mataram, 2019.
- [7] Suprpto, Heru, Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010-2014, Jurnal Ekonomi dan Manajemen Indonesia, Vol 16 No 1, 2016.
- [8] Bungin, Burhan, Metodologi Penelitian Kualitatif, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.